

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, et. all., 2001, *Kompilasi Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan, Ash-shofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke empat, PT. Rineka Cipta , Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak: dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.S Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir , 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prayudi, Guse, 2007, *Seluk Beluk Perjanjian: yang Penting untuk Diketahui Mulai dari A-Z*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Satjipto, Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-v, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **B. Tesis**

- Prayoga, Komang Kusuma Diharta, “Kajian Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang Disertai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Tanah Obyek Perjanjian”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Puspa, Elok Arum, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Umelva, “Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Yang Dibacakan PPAT Yang Berada Diluar Wilayah Kerjanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Studi Kasus PPAT X di Depok)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120.

Peraturan Menteri Agraria Kepala/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tanah.

#### **D. Internet**

Cecyllia Tamara B. Schouten, “Perbuatan Maladministrasi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT Dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT”, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/>, diakses tanggal 22 November 2018.